

**ANALISIS YURIDIS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 92 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA
TERHADAP HAK-HAK TERDAKWA
YANG DIVONIS BEBAS
OLEH PENGADILAN**

SKRIPSI



Oleh:

Andryco Permana Muttaqin

140710034

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2019**

**ANALISIS YURIDIS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 92 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA
TERHADAP HAK-HAK TERDAKWA
YANG DIVONIS BEBAS
OLEH PENGADILAN**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**



Oleh

Andryco Permana Muttaqin

140710034

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FALKUTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2019**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana dan/atau magister), baik di Universitas Putera Batam maupun di perguruan tinggi lain.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi.

Batam, 16 Februari 2019
Yang membuat pernyataan,

Andryco Permana Muttaqin
140710034

**ANALISIS YURIDIS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 92 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA
TERHADAP HAK-HAK TERDAKWA
YANG DIVONIS BEBAS
OLEH PENGADILAN**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**

**Oleh
Andryco Permana Muttaqin
140710034**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
seperti tertera di bawah ini**

Batam, 16 Februari 2019

**Lenny Husna, S.H., M.H.
Pembimbing**

ABSTRAK

Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi keadilan. Hal ini bertujuan untuk memberikan keadilan sosial dan kedamaian bagi warga. Orang-orang, yang melanggar hukum, akan didenda atau dipenjara, tanpa menghilangkan hak-hak tersangka atau terdakwa sebagai manusia. Jadi polisi tidak bisa merebut hak-hak para terdakwa. Jika itu terjadi, terdakwa diijinkan untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Ini juga bertujuan agar penegak hukum tidak bertindak sesuka mereka. Dalam studi kasus ini, masalah yang penulis fokuskan adalah tentang Analisis Yuridis dari Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang implementasi KUHAP tentang hak-hak terdakwa yang dituduh secara salah dan dibebaskan oleh pengadilan serta tata cara untuk mendapatkan hak yang dimaksudkan. Penelitian ini adalah penelitian normatif di mana penulis melihat-lihat buku, membaca dari internet dan undang-undang untuk menyelesaikan penelitian. Melalui penelitian ini, penulis menemukan bahwa ada kompensasi dalam bentuk uang dan rehabilitasi para terdakwa yang dituduh secara salah namun dibebaskan oleh pengadilan dan jumlah kompensasi telah direvisi selama bertahun-tahun dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tetapi implementasi hukum ini belum sempurna karena ada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 983 / KMK.01 / 1983 tentang langkah-langkah untuk mengklaim uang ganti rugi tersebut. Oleh karena itu, penulis berharap agar pemrosesan pencairan uang dapat ditinjau kembali.

Kata kunci: Hak terdakwa, kompensasi, terdakwa dibebaskan.

ABSTRACT

Indonesia is a country that upholds justice. This aims to give social equity and peace the the citizens People, who went against the law, will be fined or jailed, without taking away the rights of suspects or defendant as human being. So police can't seize the rights of the defendants. If it does happen, defendants are allowed to fight for their rights. This also aims so that the law enforcers do not act as they please. In this case study, the problem that author focuses is about the Juridical Analysis of Government Regulation Number 92 of 2015 concerning about the implementations of KUHAP on rights of defendants that's wrongly accused and is freed by the court. This is study is a normative study where author look through books and laws to complete the study. Through this study, author found that there is a compensation in a form of money and rehabilitation the defendants who are wrongly accused and yet set free by the court and the amount of compensation has been revised through years (from Government Regulation Number 27 of 1983 to Government Regulation Number 92 of 2015) but this implementation of law is not perfect yet for there is Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 983/KMK.01/1983 on steps to claim the compensation. Therefore, author do hope that the processed on claiming the money could be revised.

Keywords: Defendants right, compensation, defendants set free.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi dengan judul: Analisis Yuridis Peraturan Pemerintah nomor 92 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terhadap Hak-Hak Terdakwa Yang Divonis Bebas Oleh Pengadilan. Ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Di Universitas Putera Batam.

Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk Itu, dengan segala kerendahan hati , penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom, M.SI. selaku Rektor Universitas Putera Batam
2. Bapak Suhardianto, S.Hum., M.Pd. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora.
3. Ibu Rizki Tri Anugrah Bhakti, S.H., M.H. selaku wakil dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora.
4. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, UniversitasPuteraBatam

5. Ibu Lenny Husna, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu dan memberikan bimbingan serta arahan sampai selesainya skripsi ini.
6. Pak Drs. Ukas, S.H., M.Hum., Pak Agus Riyanto, S.H., M.Kn., Parningotan Malau, S.T., S.H., M.H., Ibu Irene Svinarky, S.H., M.Kn., Pak Zuhdi Arman, S.H., M.H., Pak Radius, S.H., M.H dan Pak Zulkifli, S.H., M.H. Selaku Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam yang telah banyak membantu penulis selama menuntut ilmu di Universitas Putera Batam.
7. Staff Universitas Putera Batam yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di Universitas Putera Batam.
8. Staff Sekolah Putra Batam telah mendukung penulis selama menuntut ilmu di Universitas Putera Batam.
9. Teristimewa buat mama, ayah dan adik-adik yang telah memberikan dorongan, dukungan, kasih sayang dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Untuk kakakku Kiki Sumanti, S.SI yang baik hati dan selalu mensupport penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Bapak Tonny, Ibu Fifi, Ibu Neny, dan Ibu Yvonne atas dukungan yang telah diberikan.
12. Sahabat-sahabatku (Deviana, Juwintar Febriani Aruan, Debi Vionika, Arin Dwi Jayanti dan Tc Rina) dan rekan-rekan mahasiswa khususnya program studi S1 Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.
Amin

Batam, 16 Februari 2019

Andryco Permana Muttaqin

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	i
ABSTRAK.....	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	7
1.3. Rumusan Masalah.....	7
1.4. Tujuan Penelitian	8
1.5. Batasan Masalah	8
1.6. Manfaat Penelitian	9
1.6.1. Manfaat Teoritis	9
1.6.2. Manfaat Praktis.....	9
BAB II.....	11
TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. Kerangka Teori	11
2.1.1. Pengertian Hukum Acara Pidana.....	11
2.1.2. Pihak yang Terlibat dalam Hukum Acara Pidana.....	13
2.1.3. Praperadilan	18
2.1.4. Objek Praperadilan	24
2.1.4.1. Sah atau Tidaknya Penangkapan dan Penahanan.....	24
2.1.4.2. Sah atau Tidaknya Penghentian Penyidikan	28
2.1.4.3. Sah atau Tidaknya Penuntutan	30
2.1.5. Definisi Ganti Rugi.....	31
2.1.6. Definisi Rehabilitasi	33
2.1.7. Teori.....	35
2.1.7.1. Analisis Yuridis.....	35
2.1.7.2. Hak-Hak Terdakwa	36

2.2. Kerangka Yuridis.....	38
2.2.1. UUD 1945.....	38
2.2.2. UU No 8 tahun 1981 tentang KUHAP	39
2.2.3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	39
BAB III	42
METODOLOGI PENELITIAN.....	42
3.1. Jenis dan Sifat Penelitian	42
3.1.1. Jenis Penelitian	42
3.1.2. Sifat Penelitian	43
3.2. Metode Pengumpulan Data.....	44
3.2.1. Jenis Data	44
3.2.2. Alat Pengumpulan Data.....	46
3.2.3. Lokasi Penelitian	46
3.2.4. Metode Analisis Data	47
3.3. Penelitian Sebelumnya.....	47
BAB IV	53
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	53
4.1. Tata cara permohonan ganti kerugian terdakwa yang divonis bebas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terhadap Hak-Hak Terdakwa yang Divonis Bebas Oleh Pengadilan.....	53
4.2. Analisis dari Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 terhadap hak-hak terdakwa yang divonis bebas oleh pengadilan.....	56
BAB V	59
SIMPULAN DAN SARAN	59
5.1. Simpulan.....	59
5.2. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	62
Lampiran 1. Curriculum Vitae	64
Lampiran 2. Surat Keterangan Penelitian	65